

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON III INSPEKTUR PEMBANTU I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Asli, M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

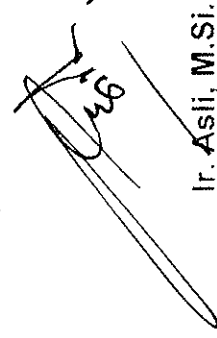
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Inspektur



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,
Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I



Ir. Asli, M.Si.
NIP. 19631024 198503 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON III

INSPEKTUR PEMBANTU I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Asli, M.Si.

Jabatan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Kota Medan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.

Jabatan : Inspektur Kota Medan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

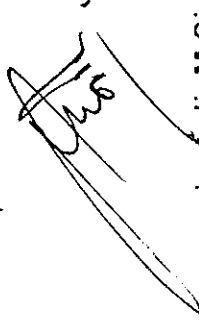
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Inspektur



Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.
NIP. 19620107 198408 1 001

Medan,
Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I



Ir. Asli, M.Si.
NIP. 19631024 198503 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON III

INSPEKTUR PEMBANTU I

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u>) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi <u>tindak pidana korupsi</u>) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan PKPT x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, <u>efisien, dan ekonomis</u> x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u>) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%

Medan,

Pihak Kedua
Inspektur

Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.
NIP. 19620107 198408 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I,

Ir. Asli, M.Si.
NIP. 19631024 198503 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON III
INSPEKTUR PEMBANTU I

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Target
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, kebijakan daerah, keuangan, dan pengelolaan kepegawaian yang berindikasi tindak pidana korupsi) x 100 % (Jumlah temuan pengawas internal)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-Pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - hasil pemantauan TL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	(Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi) x 100 % (Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima)	- Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	20%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan PKPT	(Jumlah Kegiatan Pengawasan PKPT x 100 % (Pelaksanaan PKPT)	- Laporan hasil evaluasi/audit/reviu	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi SAKIP	(Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi) x 100 % (Jumlah PD yang dievaluasi)	Laporan hasil evaluasi	90%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah temuan yang berindikasi efektif, efisien, dan ekonomis x 100 % Jumlah temuan	Laporan hasil pemeriksaan	80%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	(Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas <u>pengawas internal</u>) x 100 % (Jumlah pernyataan)	Laporan assessment BPKP RI	100%

Medan,

Pihak Kedua
Inspektur

Ikhwan Habibi Daulay, S.H., M.H.
NIP. 19620107 198408 1 001

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I

Ir. Asli, M.Si.
NIP. 19631024 198503 1 005